

**TUGAS AKHIR**  
**ANALISIS PENGARUH PERENCANAAN PAJAK TERHADAP LABA**  
**PERUSAHAAN PADA**  
**PT RISET PERKEBUNAN NUSANTARA PERIODE 2019 - 2021**



**DISUSUN OLEH :**  
**FINURI ULYA MUFIDA AKMALIA**  
**20.03.010**

**PROGRAM STUDI**  
**DIPLOMA III AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA**  
**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ANALISIS PENGARUH PERENCANAAN PAJAK TERHADAP LABA  
PERUSAHAAN PADA PT RISET PERKEBUNAN NUSANTARA  
PERIODE 2019-2021**

Disusun Oleh :

Nama : FINURI ULYA MUFIDA AKMALIA  
NIM : 2003010  
Program Studi : D-III Akuntansi

Telah diperiksa dan disetujui  
Yogyakarta, Agustus 2023

Dosen Pembimbing dan Penguji I



Mahagiyani, SE., MM  
NIDN 0514127602

Dosen Penguji II



Suwandhi, S.E., M.Si  
NIDN 0504095901

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Mahagiyani, SE., MM  
NIDN 0514127602

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang mana atas berkah dan limpahan rahmat-Nya penulis dapat melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan III, menyusun, dan juga menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “ANALISIS PENGARUH PERENCANAAN PAJAK TERHADAP LABA PERUSAHAAN PADA PT RISET PERKEBUNAN NUSANTARA PERIODE 2019-2021”. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi penelitian tugas akhir yang memberikan banyak manfaat bagi penulis sendiri, tempat pelaksanaan PKL III dan Penelitian Tugas Akhir, serta keilmuan sebagai sumber informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Penulis menyadari bahwa penelitian tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritikan dan saran yang membangun dari pembaca demi menyempurnakan tugas akhir serta laporan yang disusun penulis di masa mendatang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk penulis dan juga pembaca.

Yogyakarta,

Finuri Ulya Mufida Akmalia

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>INTISARI</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Batasan Masalah.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	5
<b>BAB III HIPOTESIS</b> .....	18
A. Hipotesis 1.....	18
B. Hipotesis 2.....	18
<b>BAB IV METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	19
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Objek Penelitian.....	19
C. Metode Pengumpulan Data.....	19
D. Sumber Data Penelitian.....	20

<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	22
A. Hasil Penelitian .....	22
1. Pelaksanaan Perencanaan Pajak pada PT Riset Perkebunan Nusantara ...	22
2. Perolehan Laba PT Riset Perkebunan Nusantara .....	28
3. Manajemen Laba Perusahaan pada PT Riset Perkebunan Nusantara .....	30
B. Pembahasan .....	32
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	36
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	38
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>40</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Indikator dan bobot aspek keuangan.....	10
Tabel 2 Daftar Skor Penilaian ROE.....	11
Tabel 3 Daftar Skor Penilaian ROI.....	12
Tabel 4 Daftar Skor Penilaian Cash Ratio.....	13
Tabel 5 Daftar Skor Penilaian Current Ratio.....	13
Tabel 6 Daftar skor penilaian Collection Periods.....	14
Tabel 7 Daftar skor penilaian persediaan.....	15
Tabel 8 Daftar skor penilaian perputaran total aset.....	16
Tabel 9 Daftar Skor penilaian rasio modal sendiri terhadap total aset.....	17
Tabel 10 Perhitungan TRR (Tax Rentetion Ratio).....	27
Tabel 11 Data Laba Rugi PT Riset Perkebunan Nusantara tahun 2018 -2021 .....	29

## **DAFTAR GAMBAR**

Lampiran 1 Perhitungan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain.....	29
---	----

## INTISARI

Pajak merupakan iuran wajib bagi orang pribadi maupun badan yang diserahkan kepada negara. Pajak memiliki undang-undang serta peraturan-peraturan yang berlaku bagi wajib pajak. Perusahaan-perusahaan biasanya melakukan perencanaan pajak untuk menekan biaya dan sebagai salah satu langkah dalam penerapan manajemen laba perusahaan. PT Riset Perkebunan Nusantara juga melakukan upaya-upaya perencanaan pajak untuk menekan biaya pajak yang mempengaruhi laba periode perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari perencanaan pajak yang dilakukan PT Riset Perkebunan Nusantara terhadap laba perusahaan. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara dan studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan diskusi bersama pembimbing penelitian sekaligus Kepala Urusan Perpajakan di PT Riset Perkebunan Nusantara. Studi pustaka dilakukan dengan dokumen-dokumen perusahaan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa kegiatan perencanaan pajak berpengaruh terhadap laba perusahaan karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba perusahaan. Namun perencanaan pajak yang dilakukan PT Riset Perkebunan Nusantara bukanlah bagian dari manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Upaya perencanaan pajak di perusahaan juga memerlukan upaya peningkatan agar hasilnya bisa lebih maksimal.

Kata kunci: Perencanaan Pajak, Laba Perusahaan, Manajemen Laba.

## **ABSTRAK**

*Tax is mandatory contribution for individuals and entities submitted to the state. Taxes have laws and regulations that apply to taxpayers. Companies usually carry out tax planning to reduce cost and as one of the steps in implementing corporate profit management. PT Riset Perkebunan Nusantara also makes tax planning efforts to reduce tax cost that affect the company's period profit. This research aims to determine the influence of tax planning carried out by PT Riset Perkebunan Nusantara on company profits. This Research data collection method uses interview and literature studies. The interview was conducted with a discussion with a supervisor as well as The Head of Tax Affairs at PT Riset Perkebunan Nusantara. Literature studies are conducted with company documents related to research. Hail this research can be explained that tax planning activities affect corporate profits because taxes are one of the factors in reducing company's profits. However, the tax planning carried out by PT Riset Perkebunan Nusantara is not part of the profit management carried out by the company. Tax planning efforts in companies also require improvement efforts so that the result can be maximized.*

*Keywords: Tax Planning, Corporate profit, Profit Management.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini dunia dihadapkan dengan adanya kasus virus COVID-19 yang berujung pada masa karantina yang tidak kunjung usai hingga pertengahan tahun 2022. Pandemi ini berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya pada perusahaan di berbagai negara di seluruh dunia. Berbagai sektor mulai runtuh karena roda ekonomi tidak bekerja dengan baik, seluruh sektor bisnis merasakan dampak yang luar biasa karena peristiwa ini. Pada pertengahan tahun 2022, setelah pemerintah memberikan himbauan agar masyarakat bisa menerapkan pola hidup *new normal* dalam rangka hidup berdampingan dengan pandemi demi membangun kembali kehidupan setelah terpuruk selama kurang lebih dua tahun. pola hidup *new normal* ini yang akhirnya terbukti berhasil diterapkan setelah percobaan kedua.

Perubahan ekonomi yang terjadi saat pandemi juga terjadi pada perusahaan. Penurunan performa perusahaan juga terjadi selama melemahnya ekonomi negara. Performa kinerja ini tentunya berpengaruh pada laba perusahaan. Tinggi rendahnya laba perusahaan juga berpengaruh ke pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada negara. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menjadi salah satu faktor pengurang dari laba bersih perusahaan, semakin besar laba perusahaan, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Perusahaan tentunya menginginkan laba maksimum pada akhir periode akuntansi sebagai bukti kinerjanya yang baik disamping pandemi yang terjadi. Maka dari itu, diperlukan adanya perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai salah satu faktor

untuk memperkecil beban pajak perusahaan dan pencapaian laba setelah pajak yang ditargetkan perusahaan. Perencanaan pajak merupakan rangkaian strategi yang dilaksanakan oleh manajemen perusahaan untuk memperkecil biaya pajak yang harus disetorkan (Riyanto & Margie,2021).

*Tax planning* yang dilakukan oleh perusahaan adalah Langkah awal yang dilakukan dalam rangka manajemen pajak perusahaan. Tujuan perencanaan pajak oleh perusahaan ini adalah menekan beban pembayaran pajak sekecil mungkin dengan melakukan penghindaran pajak tanpa melakukan pelanggaran terhadap UU perpajakan dengan memanfaatkan peraturan dan hal-hal yang tidak tercantum dalam UU perpajakan.

Pemilihan judul penelitian dengan topik perpajakan ini diangkat oleh penulis karena ketertarikan terhadap mata kuliah dan profesi dibidang perpajakan. Penulis ingin menekuni bidang perpajakan sebagai tugas akhir dalam rangka mempersiapkan bekal pemilihan spesialisasi profesi setelah lulus. Penulis berharap penelitian ini dapat membantu penulis mengenal lebih dalam mengenai isu-isu perpajakan di perusahaan.

Dengan pemilihan isu perpajakan, maka penelitian selama periode PKL yang akan dilakukan akan lebih banyak berada di bagian perpajakan perusahaan. Selain hal tersebut, isu ini menarik bagi penulis karena kemungkinan penurunan performa perusahaan selama periode waktu 2019 – 2021 dimana dunia sedang dilanda Pandemi Covid-19. Periode ini bisa menjadi bahan penelitian baru dikarenakan penurunan ekonomi yang terjadi secara global pasti juga mempengaruhi keuangan dalam perusahaan. Dalam hal ini, penulis ingin mempelajari seberapa besar pengaruh dari *tax planning* ini sendiri terhadap manajemen laba perusahaan ditengah kelesuan ekonomi yang sedang terjadi.

Analisis pengaruh perencanaan pajak terhadap laba perusahaan yang dibahas dalam tugas akhir ini ditulis karena penulis tertarik di bidang pajak perusahaan dan dipilih karena belum adanya penelitian tentang topik ini yang

dibahas di Politeknik LPP Yogyakarta serta dilakukan pada PT Riset Perkebunan Nusantara. Dengan adanya penelitian “**ANALISIS PENGARUH PERENCANAAN PAJAK TERHADAP LABA PERUSAHAAN PADA PT Riset PERKEBUNAN NUSANTARA PERIODE 2019-2021**” ini, penulis berharap dapat belajar mengenai perencanaan pajak perusahaan dan kontribusinya terhadap laba perusahaan, serta isu-isu mengenai pajak lainnya. Dalam lingkup akademis, penulis ingin memberikan pandangan baru mengenai topik dan judul yang bisa diangkat dalam tugas akhir, khususnya di Politeknik LPP Yogyakarta.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perencanaan pajak pada PT Riset Perkebunan Nusantara?
2. Bagaimana perolehan laba perusahaan pada PT Riset Perkebunan Nusantara?
3. Apakah perencanaan pajak mempengaruhi laba perusahaan pada PT Riset Perkebunan Nusantara periode 2019-2021?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mempelajari implementasi perencanaan pajak yang dilakukan pada PT Riset Perkebunan Nusantara
2. Mempelajari perolehan laba pada PT Riset Perkebunan Nusantara
3. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perencanaan pajak oleh perusahaan pada PT Riset Perkebunan Nusantara Periode 2019-2021.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian-uraian diatas, manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rujukan informasi untuk penelitian – penelitian yang akan dilakukan selanjutnya mengenai topik yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Hasil penelitian yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber informasi dalam rangka perbaikan untuk PT Riset Perkebunan Nusantara.
3. Pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam rangka pengembangan studi dalam bidang perpajakan

#### **E. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan oleh penulis, batasan masalah dari penelitian ini ada pada analisis perencanaan pajak terhadap laba pada PT Riset Perkebunan Nusantara dengan periode penelitian yang terbatas pada periode waktu 2019–2021.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Laba pada PT Riset Perkebunan Nusantara ini belum pernah dibahas dan dijadikan penelitian di perusahaan terkait. Namun, untuk topik yang dibahas sudah pernah dilakukan penelitian di perusahaan yang lainnya. Penulis menemukan judul yang sama dengan penelitian namun dengan tempat penelitian yang berbeda. Jurnal hasil penelitian tersebut juga menjadi salah satu landasan penulisan tugas akhir ini, sebagai acuan dan sumber informasi pembanding.

Penelitian mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap labasebelumnya sudah banyak diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu, beberapa diantaranya adalah Ferry Aditama (2014) dan Aluinahot Telaumbanua (2021). Ferry Aditama (2014) meneliti tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap laba untuk meneliti respon manajemen setelah adanya penurunan tarif pajak tunggal pada tahun 2010 pada perusahaan non manufaktur yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia. Sedangkan Aluina Telaumbanua(2021) meneliti pengaruh perencanaan pajak terhadap laba perusahaan dengan tujuan pembuktian hipotesis yang menunjukkan pengaruh positif perencanaan pajak dengan laba perusahaan pada PT Sari Enesis Indah pada periode 2017-2020. Hasil penelitian terdahulu bervariasi sehingga terdapat peluang dilakukannya penelitian dengan topik yang sama sebagai penelitian lanjutan yang bersifat replikatif maupun pengembangan.

Karena penelitian ini belum pernah dilakukan di PT Riset Perkebunan Nusantara, maka hasil penelitian juga belum pernah ada ataupun dibahas sebelumnya. Topik ini adalah topik yang penting untuk diteliti, karena dari hasil penelitian akan diperoleh pengaruh *tax planning* terhadap laba perusahaan, dimana hal tersebut bisa dijadikan informasi dan tinjauan oleh perusahaan untuk meningkatkan manajemen pajak dalam perusahaan dalam rangka meminimalisir beban pajak dan meningkatkan laba perusahaan. Selain itu, *tax planning* juga merupakan topik yang penting dibahas oleh mahasiswa di bidang akuntansi dan

pajak karena pengetahuan ini akan membantu saat terjun di dunia kerja khususnya bidang akuntansi serta perpajakan.

Perencanaan pajak (*tax planning*) menurut (Astutik 2016 dalam (Achyani & Lestari, 2019) merupakan suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak dengan berbagai cara sehingga beban pajak berupa PPh ataupun hutang pajak lain-lain berada pada nilai yang sekecil mungkin. Tujuan utama perencanaan pajak ialah untuk mengurangi besaran jumlah pajak yang akan disetorkan oleh si wajib pajak dengan memanfaatkan celah-celah pada peraturan perpajakan yang berlaku yang berguna untuk meningkatkan besaran laba setelah pajak. (Dewi et al., 2017) mengatakan perencanaan pajak dapat dikur dengan beberapa cara salah satunya dengan mengandalkan laba, laba bersih perusahaan dan laba sebelum pajak pada laporan keuangan dengan rumus *tax retention rate* atau tingkat retensi pajak.

Variable perencanaan pajak diukur menggunakan rumus TRR (*Tax Rentetion Ratio*), dimana semakin tinggi selisih antara laba bersih dengan laba sebelum pajak perusahaan, maka beban pajak yang dibayarkan perusahaan juga semakin besar. Sedangkan semakin rendah selisih tersebut, akan menghasilkan laba bersih perusahaan yang lebih tinggi.

Hasil rasio dari TRR (*Tax Rentetion Ratio*) memiliki hubungan perbandingan suatu tahun terhadap tahun sebelum dan atau sesudahnya. Tidak seperti *rate* atau *ratio* keuangan lainnya yang bisa dinyatakan dari tolak ukur hasil angka rasio, hasil TRR (*Tax Rentetion Ratio*) ini akan mengasilkan angka yang akan dibandingkan dari satu periode akuntansi ke periode lainnya dan dianalisis perubahan dari hasil tersebut. Apabila meningkat dari satu periode ke periode setelahnya, maka perencanaan pajak berhasil dilakukan secara efektif. Dan sebaliknya, ketika hasil rasio turun dari satu tahun ke tahun setelahnya maka perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan belum efektif atau masih memerlukan upaya – upaya agar hasilnya bisa lebih maksimal.

Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pergeseran Pajak (*tax shifting*) merupakan pemindahan atau transfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lainnya, sehingga orang atau badan yang dikenakan dimungkinkan tidak menanggung beban pajaknya.
- b. Kapitalisasi merupakan pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.
- c. Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
- d. Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar ketentuan pajak yang berlaku.
- e. Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif – alternatif yang riil yang dapat diterima oleh fiskus.

Penelitian ini juga membahas mengenai laba perusahaan yang akan menjadi objek yang dipengaruhi dari perencanaan pajak. Laba adalah Keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan sebagai akibat dari terjadinya kelebihan selisih pendapatan yang diperoleh perusahaan dengan pengeluaran dan biaya-biaya operasional perusahaan. Laba dipandang sebagai indikator terbaik dalam menentukan pencapaian kinerja suatu perusahaan dalam periode tertentu. Laba dapat digunakan sebagai penilaian baik buruknya kinerja suatu perusahaan semakin tinggi laba perusahaan maka semakin baik juga nilai perusahaan tersebut. Dengan mengetahui laba suatu perusahaan para investor juga dapat membuat pertimbangan apakah perusahaan tersebut layak dijadikan sebagai suatu tabungan investasi yang baik atau tidaknya dan para investor akan cenderung untuk memilih melakukan investasi di perusahaan yang memperoleh laba yang semakin tinggi dalam setiap periodenya. Ada beberapa cara dalam mengukur laba

perusahaan dalam penelitian ini untuk mengukur laba perusahaan dengan menggunakan laba setelah pajak.

Motivasi dan peluang yang dimiliki oleh manajer, membuat manajer melakukan praktik manajemen laba pada laporan keuangan perusahaan. Namun dalam melakukan praktik manajemen laba, manajer harus melakukan dengan cermat agar tidak mudah diketahui oleh pihak lain. Setiowati (2007) menyatakan bahwa ada tiga teknik manajemen laba yang dapat dilakukan oleh manajemen, antara lain:

- a. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi Cara manajemen laba untuk mempengaruhi laba melalui judgement terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.
- b. Mengubah metode akuntansi Manajemen memiliki kesempatan untuk merubah metode akuntansi perusahaan yang sesuai dengan kondisi perusahaan pada periode tersebut. Perubahan dalam metode akuntansi harus diungkapkan dengan jelas beserta alasannya yang rasional dalam catatan pelaporan keuangan. Contoh: merubah depresiasi aktiva tetap dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.
- c. Menggeser periode biaya atau pendapatan Di dalam SAK mengharuskan perusahaan menggunakan dasar akrual dalam pencatatan laporan keuangan (kecuali laporan arus kas), sehingga memberikan kesempatan bagi manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan perusahaan. Contohnya adalah mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya.

Peran perencanaan pajak dalam praktik manajemen laba secara konseptual dapat dijelaskan dengan teori keagenan dan teori akuntansi positif. Pada teori keagenan, dalam hal ini pemerintah (fiskus) sebagai pihak *principal* dan manajemen sebagai pihak agent masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal

pembayaran pajak. Perusahaan (*agent*) berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Di lain pihak, pemerintah (*principal*) memerlukan dana dari penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dengan demikian, terjadi konflik kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah, sehingga memotivasi agent meminimalkan beban pajak yang harus dibayar kepada pemerintah. Pada teori akuntansi positif dalam hipotesis ketiga yaitu The Political Cost Hypothesis (Scott, 2000) juga menjelaskan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, salah satunya adalah beban pajak.

Manajemen laba seringkali dikaitkan dengan praktik *window dressing*. *Window dressing* merupakan istilah dalam bidang keuangan dimana laporan keuangan perusahaan dibuat sedemikian rupa agar kinerja dan angka didalamnya dapat dikategorikan menjadi perusahaan sehat. Kategori ini didapatkan dari ketentuan dalam Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN Non Jasa Keuangan dengan total bobot kategori BUMN non Infrastruktur dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Dalam penilaian aspek keuangan ini, indikator yang dinilai dalam masing-masing bobotnya adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Daftar Indikator dan bobot aspek keuangan

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Imbalan kepada pemegang saham (ROE)	15	20
2. Imbalan Investasi (ROI)	10	15
3. Rasio Kas	3	5
4. Rasio Lancar	4	5
5. Collection Periods	4	5
6. Perputaran Persediaan	4	5
7. Perputaran total aset	4	5
8.		
9. Rasio Modal Sendiri terhadap total aktiva	6	10
Total Bobot	50	70

Hasil bobot tersebut didapatkan dari metode penilaian berikut:

- a. Imbalan kepada pemegang saham/Return On Equity (ROE)

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Definisi:

Definisi :

1. Laba setelah Pajak adalah Laba setelah Pajak dikurangi dengan laba hasil penjualan dari Aktiva tetap, Aktiva Non Produktif, Aktiva Lain-lain, Saham Penyertaan Langsung.
2. Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri dalam neraca perusahaan pada posisi akhir tahun buku dikurangi dengan komponen Modal sendiri yang digunakan untuk membiayai Aktiva Tetap dalam

Pelaksanaan dan laba tahun berjalan. Dalam Modal sendiri tersebut di atas termasuk komponen kewajiban yang belum ditetapkan statusnya.

3. Aktiva Tetap dalam pelaksanaan adalah posisi pada akhir tahun buku Aktiva Tetap yang sedang dalam tahap pembangunan.

Tabel 11 Daftar Skor Penilaian ROE

ROE (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
15 < ROE	15	20
13 < ROE ≤ 15	13,5	18
11 < ROE ≤ 13	12	16
9 < ROE ≤ 11	10,5	14
7,9 < ROE ≤ 9	9	12
6,6 < ROE ≤ 7,9	7,5	10
5,3 < ROE ≤ 6,6	6	8,5
4 < ROE ≤ 5,3	5	7
2,5 < ROE ≤ 4	4	5,5
1 < ROE ≤ 2,5	3	4
0 < ROE ≤ 1	1,5	2
ROE < 0	1	0

- b. Imbalan Investasi/*Return on Investment* (ROI)

$$ROI = \frac{EBIT + Penyusutan}{Capital Employed} \times 100\%$$

Definisi:

1. EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi laba dari hasil penjualan dari Aktiva Tetap, Aktiva lain-lain, Aktiva Non Produktif, Saham penyertaan langsung
2. Penyusutan adalah Depresiasi, Amortisasi dan Deplesi
3. Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku Total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap dalam pelaksanaan.

Tabel 12 Daftar Skor Penilaian ROI

ROI (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
18 < ROI	10	15
15 < ROI <= 18	9	13,5
13 < ROI <= 15	8	12
12 < ROI <= 13	7	10,5
10,5 < ROI <= 12	6	9
9 < ROI <= 10,5	5	7,5
7 < ROI <= 9	4	6
5 < ROI <= 7	3,5	5
3 < ROI <= 5	3	4
1 < ROI <= 3	2,5	3
0 < ROI <= 1	2	2
ROI < 0	0	1

c. Rasio Kas/*Cash Ratio*

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Surat Berharga Jangka Pendek}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Definisi:

1. Kas, Bank dan surat Berharga Jangka Pendek adalah posisi masing-masing pada akhir tahun buku.
2. Current Liabilities adalah posisi seluruh kewajiban Lancar pada akhir tahun buku.

Tabel 13 Daftar Skor Penilaian Cash Ratio

<b>Cash Ratio = x (%)</b>	<b>Skor</b>	
	<b>Infra</b>	<b>Non Infra</b>
$x \geq 35$	3	5
$25 \leq x < 35$	2,5	4
$15 \leq x < 25$	2	3
$10 \leq x < 15$	1,5	2
$5 \leq x < 10$	1	1
$0 \leq x < 5$	0	0

d. Rasio Lancar/*Current Ratio*

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Definisi:

1. Current Asset adalah posisi Total Aktiva Lancar pada akhir tahun buku
2. Current Liabilities adalah posisi Total Kewajiban Lancar pada akhir tahun buku .

Tabel 14 Daftar Skor Penilaian Current Ratio

<b><i>Current Ratio</i> = x (%)</b>	<b>Skor</b>	
	<b>Infra</b>	<b>Non Infra</b>
$125 \leq$	3	5
$110 \leq x < 125$	2,5	4
$100 \leq x < 110$	2	3
$95 \leq x < 100$	1,5	2
$90 \leq x < 95$	1	1
$x < 90$	0	0

e. *Collection Periods/CP*

$$CP = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 100\%$$

Definisi:

1. Total Piutang Usaha adalah posisi Piutang Usaha setelah dikurangi Cadangan Penyisihan Piutang pada akhir tahun buku
2. Total Pendapatan Usaha adalah jumlah Pendapatan Usaha selama tahun buku.

Tabel 15 Daftar skor penilaian Collection Periods

CP = x (hari)	Perbaikan = x (hari)	Skor	
		Infra	Non Infra
$x \leq 60$	$x > 35$	4	5
$60 < x \leq 90$	$30 < x \leq 35$	3,5	4,5
$90 < x \leq 120$	$25 < x \leq 30$	3	4
$120 < x \leq 150$	$20 < x \leq 25$	2,5	3,5
$150 < x \leq 180$	$15 < x \leq 20$	2	3
$180 < x \leq 210$	$10 < x \leq 15$	1,6	2,4
$210 < x \leq 240$	$6 < x \leq 10$	1,2	1,8
$240 < x \leq 270$	$3 < x \leq 6$	0,8	1,2
$270 < x \leq 300$	$1 < x \leq 3$	0,4	0,6
$300 < x$	$0 < x \leq 1$	0	0

f. *Perputaran Persediaan*

$$PP = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 100\%$$

Definisi:

1. Total Persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan untuk proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi dan persediaan barang jadi ditambah persediaan peralatan dan suku cadang.

2. Total Pendapatan Usaha adalah Total Pendapatan Usaha dalam tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 16 Daftar skor penilaian persediaan

PP = x (hari)	Perbaikan = x (hari)	Skor	
		Infra	Non Infra
$x \leq 60$	$x > 35$	4	5
$60 < x \leq 90$	$30 < x \leq 35$	3,5	4,5
$90 < x \leq 120$	$25 < x \leq 30$	3	4
$120 < x \leq 150$	$20 < x \leq 25$	2,5	3,5
$150 < x \leq 180$	$15 < x \leq 20$	2	3
$180 < x \leq 210$	$10 < x \leq 15$	1,6	2,4
$210 < x \leq 240$	$6 < x \leq 10$	1,2	1,8
$240 < x \leq 270$	$3 < x \leq 6$	0,8	1,2
$270 < x \leq 300$	$1 < x \leq 3$	0,4	0,6
$300 < x$	$0 < x \leq 1$	0	0

- g. Perputaran Total Aset/*Total Asset Turnover* (TATO)

$$TATO = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Definisi:

1. Total Pendapatan adalah Total Pendapatan Usaha dan Non Usaha tidak termasuk pendapatan hasil penjualan Aktiva Tetap
2. Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan.

Tabel 17 Daftar skor penilaian perputaran total aset

TATO = x (%)	Perbaikan = x (%)	Skor	
		Infra	Non Infra
120 < x	20 < x	4	5
105 < x <= 120	15 < x <= 20	3,5	4,5
90 < x <= 105	10 < x <= 15	3	4
75 < x <= 90	5 < x <= 10	2,5	3,5
60 < x <= 75	0 < x <= 5	2	3
40 < x <= 60	x <= 0	1,5	2,5
20 < x <= 40	x < 0	1	2
x <= 20	x < 0	0,5	1,5

- h. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset (TMS terhadap TA)

$$\text{TMS terhadap TA} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Definisi:

1. Total Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri pada akhir tahun buku diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya.
2. Total Asset adalah Total Asset dikurangi dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada poisisi akhir tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 18 Daftar Skor penilaian rasio modal sendiri terhadap total aset

TMS thd TA (%) = x	Skor	
	Infra	Non Infra
$x < 0$	0	0
$0 \leq x < 10$	2	4
$10 \leq x < 20$	3	6
$20 \leq x < 30$	4	7,25
$30 \leq x < 40$	6	10
$40 \leq x < 50$	5,5	9
$50 \leq x < 60$	5	8,5
$60 \leq x < 70$	4,5	8
$70 \leq x < 80$	4,25	7,5
$80 \leq x < 90$	4	7
$90 \leq x < 100$	3,5	6,5

Perhitungan indikator kesehatan perusahaan ini berlaku untuk perusahaan yang termasuk kedalam BUMN.

Perusahaan melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin, bukan hanya untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal saja, tetapi sebenarnya perusahaan juga memperoleh keuntungan dalam memperoleh tambahan modal dari pihak investor melalui penjualan saham perusahaan. Status perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung *high profile* daripada perusahaan yang belum. Agar nilai saham perusahaan meningkat, maka manajemen termotivasi untuk memberikan informasi kinerja perusahaan yang sebaik mungkin. Oleh karena itu, pajak yang merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi kepada investor atau diinvestasikan oleh perusahaan, akan diusahakan oleh manajemen untuk diminimalkan untuk mengoptimalkan jumlah dari laba bersih perusahaan

### **BAB III**

#### **HIPOTESIS**

Penelitian ini menganalisis tentang hubungan perencanaan pajak dengan laba perusahaan pada PT Riset Perkebunan Nusantara pada periode 2019-2021. Batasan masalah dari penelitian ini sudah cukup jelas terdapat pada judul tugas akhir penelitian. Untuk penelitian ini, objek yang akan diteliti adalah perencanaan pajak dan juga laba perusahaan, mengenai apa hubungan diantara kedua objek tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai topik yang serupa, maka terdapat hipotesis sebagai berikut:

#### **A. Hipotesis I**

Terdapat perubahan yang signifikan antara laba sebelum pajak dan setelah pajak ketika perencanaan pajak diterapkan dan sebelum perencanaan pajak diterapkan.

#### **B. Hipotesis II**

Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap laba, dimana semakin tinggi perencanaan pajak, maka semakin tinggi peluang perusahaan melaksanakan manajemen laba meskipun pada implementasinya, pengaruhnya kecil karena banyak faktor yang mempengaruhi Manajemen Laba.

## **BAB IV**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dimana penulis menjelaskan hubungan antara perencanaan pajak dan laba secara kuantitatif namun tanpa data statistic. Hasil penelitian akan dianalisis dan diolah kemudian disimpulkan. Dengan metode ini, maka hubungan antara objek yang diteliti dapat disimpulkan dari dua objek yang diteliti.

Jenis penelitian yang akan digunakan juga memuat deskriptif eksploratif dimana penulis akan mengeksplor fenomena yang terjadi antara kedua objek dalam batasan masalah yang sudah ditentukan yakni pada PT Riset Perkebunan Nusantara dengan periode 2019-2021.

#### **B. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini mencakup perencanaan pajak dan laba perusahaan. Dimana akan dianalisis hubungan antara kedua objek ini. Hasil hubungan ini akan menjadi hasil penelitian yang berupa jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya dibahas pada bagian pendahuluan.

#### **C. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah metode yang dipakai untuk mengumpulkan data-data penelitian. Artinya, dalam menulis maupun membuat karya ilmiah, penulis harus menentukan teknik pengumpulan data yang sesuai dan tepat. Dalam penelitian, teknik pengumpulan data diperlukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan, hambatan, atau permasalahan. Tidak hanya tepat, teknik pengumpulan data sebaiknya bersifat sistematis.

Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, metode ini akan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai perencanaan pajak perusahaan, dan akan dilakukan kepada bidang akuntansi dan perpajakan perusahaan.

2. Studi literatur, dimana penulis akan mengumpulkan informasi dari data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan, dan dokumen keuangan perusahaan yang berkaitan dengan laba dan perencanaan pajak.

#### **D. Sumber Data Penelitian**

Sumber data akan terbagi menjadi dua, yakni sumber dua, adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer yang merupakan data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung, didapatkan melalui wawancara dengan bidang akuntansi dan perpajakan.
2. Sumber data sekunder adalah sumber data *second hand* yang biasanya berupa data statistic yang sudah siap pakai, dalam hal ini sumber data yang dibutuhkan adalah laporan tahunan perusahaan, anggaran, dan sumber data siap pakai lainnya.

Penulis akan mengumpulkan data tentang laporan keuangan PT Riset Perkebunan Nusantara dari tahun 2019-2021 untuk kepentingan pembahasan penelitian, sekaligus menggunakan metode wawancara dengan pihak akuntansi dan perpajakan perusahaan. Dengan demikian, penulis meyakini bahwa informasi yang akan diperoleh adalah benar.

#### **E. Metode Analisis**

Metode analisis hasil akan dilakukan dengan metode berikut:

1. Studi Pustaka, akan membandingkan teori dari jurnal referensi dan SOP ataupun bahan pustaka dari perusahaan yang dapat dijadikan perbandingan.
2. Metode Wawancara, berdasarkan informasi yang didapat dari studi pustaka, maka akan ada hal – hal yang berbeda dari teori jurnal dan sumber pustaka perusahaan. Perbedaan ini dapat dibahas melalui studi wawancara untuk mendapatkan gambaran aplikasi dari teori yang ada di perusahaan.
3. Metode analisis, metode ini akan dilakukan apabila sumber informasi

penulis dan data berupa perencanaan pajak dan manajemen laba sudah didapatkan. Analisis ini akan menggunakan TRR (*Tax Rentation Rate*), yaitu suatu alat dengan fungsi untuk menganalisa suatu ukuran dari tingkat efektifitas manajemen pajak yang dilakukan pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan (Wild et al., 2004). Hasil dari perhitungan TRR (*Tax Rentation Rate*) ini akan dibandingkan dari tahun 2019-2021 dan dianalisis hubungannya dengan tingkat laba perusahaan. Perhitungan TRR dilakukan dengan menggunakan rumus  $\text{Net Income} / \text{Pretax Income (EBIT)}$ .

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### 1. Pelaksanaan Perencanaan Pajak pada PT Riset Perkebunan Nusantara

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan selama kurang lebih 8 minggu dari hasil wawancara ditemukan bahwa PT Riset Perkebunan Nusantara penulis mendapatkan wawasan baru bahwasannya perencanaan pajak pasti dilakukan oleh perusahaan, termasuk PT Riset Perkebunan Nusantara. Namun, yang perlu diketahui cara ini tidak dilakukan secara baku sehingga tidak terdapat SOP (*Standard Operating Precedure*) yang mengatur tentang apa saja jenis maupun bagaimana caranya mengkreditkan pajak untuk meminimalisir besaran beban pajak pada laporan keuangan.

Meskipun dijelaskan seperti diatas, perusahaan tetap menjalankan perencanaan pajak secara intensional dengan tujuan salah satunya manajemen laba. Menurut data yang penulis dapatkan dari wawancara bersama dengan Staf Perpajakan PT Riset Perkebunan Nusantara, ada beberapa cara yang dilakukan oleh Bagian Akuntansi dan Perpajakan di perusahaan yang termasuk dalam perencanaan perpajakan. Beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut:

##### a. Melakukan Ekualisasi PPh 21 dan PPN dengan faktur keluaran

Ekualisasi berasal dari kata equal yang bisa diartikan sebagai proses untuk menyamakan. Secara sederhana, ekualisasi merupakan suatu proses untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak lainnya yang memiliki hubungan. Atau, bagian laporan dari satu jenis pajak yang merupakan bagian dari laporan jenis pajak yang lain.

Proses ekualisasi pajak dilakukan untuk menyamakan pendapatan dari objek pajak yang dicatat dalam laporan keuangan dengan biaya atau

pendapatan dari objek pajak yang dilaporkan dalam SPT tahunan yang akan diserahkan ke KPP.

Ekualisasi pajak ditujukan agar wajib pajak mempersiapkan diri apabila terdapat imbauan atau pemeriksaan oleh kantor pajak. Selain itu, wajib pajak juga terhindar dari koreksi pajak ketika berlangsung pemeriksaan pajak.

Sedangkan, dari sisi wajib pajak sendiri, ekualisasi pajak dapat dikatakan sebagai bentuk preventif untuk menghadapi pemeriksaan pajak. Selain itu, ekualisasi pajak juga bisa menjadi petunjuk bagi wajib pajak bahwa kewajiban penyampaian SPT tahunannya sudah dilakukan dengan benar.

Dasar Hukum Ekualisasi Pajak diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2012 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Akan tetapi, peraturan tersebut sudah tidak diberlakukan lagi berdasarkan PER-07/PJ/2014 tentang Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2012. Namun, penggunaan teknik ekualisasi, Anda dapat mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan dalam Rangka Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

- b. Melakukan koreksi fiskal sehingga laba fiskal menjadi lebih kecil  
Koreksi fiskal adalah kegiatan pencatatan, pembetulan, dan penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Koreksi fiskal ini muncul karena adanya perbedaan dalam pengakuan penghasilan dan biaya dalam laporan keuangan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Nantinya, laporan komersial akan disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan keuangan secara fiskal. Maka laporan keuangan bisa menjadi dasar atau prediksi langkah apa yang harus

diambil sebuah perusahaan guna meningkatkan bisnisnya.

Laporan keuangan suatu perusahaan bisa menjadi acuan dalam menjawab segala penyebab krusial dari perjalanan dan reputasi, serta kinerja perusahaan. Setelah membuat laporan keuangan yang terdiri dari penghitungan keuangan, laporan komersial tentang pemasukan dan pengeluaran perusahaan, serta keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya akan dilakukan penghitungan rekonsiliasi fiskal. Maka, pajak yang selama ini dilakukan perusahaan berdasarkan pada rekonsiliasi fiskal tersebut.

Setelah perusahaan melakukan koreksi, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menindaklanjuti koreksi tersebut berdasarkan draft yang sudah diajukan perusahaan. Aktivitas yang dilakukan secara rutin ini akan dituangkan dalam SPT Tahunan yang diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak badan dikukuhkan. Koreksi fiskal sendiri dalam undang-undang disebutkan terbagi menjadi 2, yakni:

- 1) Koreksi Fiskal Positif, biasanya terkait biaya-biaya yang tidak diperbolehkan oleh pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU PPh. Adapun contoh biaya yang dimaksud adalah sebagai berikut:
  - Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi bagian dari tanggungannya.
  - Dana cadangan.
  - Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk kenikmatan atau natura.
  - Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan ke pihak yang memiliki hubungan istimewa terkait pekerjaan yang dilakukan.
  - Harta yang dihibahkan, sumbangan, atau bantuan.
  - Pajak penghasilan.

- Gaji yang dibayarkan kepada pemilik.
- Sanksi administrasi.
- Selisih penyusutan atau amortisasi komersial diatas penyusutan/amortisasi fiskal.
- Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- Penyesuaian fiskal positif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang disebutkan sebelumnya.

2) Koreksi Fiskal Negatif, yang kita bahas dalam poin pembahasan ini, yang akan menyebabkan laba kena pajak berkurang atau akan menjadi pengurangan PPh terutang. Karena pendapatan yang lebih tinggi daripada pendapat fiskal dan biaya komersial yang lebih kecil daripada biaya fiskal. Adapun penyebab dari munculnya koreksi fiskal negatif biasanya dari penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk dalam objek pajak namun termasuk dalam peredaran usaha (PPh Pasal 4 ayat (2)), dan selisih penyusutan/amortisasi komersialnya di bawah penyusutan/amortisasi fiskal, dan penyesuaian fiskal negatif lainnya. Berikut ini contoh jenis koreksi fiskal negatif:

- Penghasilan transaksi saham.
- Penghasilan hadiah atau undian.
- Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
- Penghasilan dari bunga deposito dan tabungan.
- Penghasilan transaksi pengalihan harta.

c. Meminta Bukti Potong Pajak Masukan kepada perusahaan rekanan untuk dikreditkan

Pajak masukan atau PPN Masukan merupakan pajak yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penerimaan Barang

kena Pajak (BKP) atau penerimaan jasa kena pajak (JKP). Oleh karena itu, yang harus membayar PPN ini adalah pembeli barang/pengguna jasa dari PT Riset Perkebunan Nusantara. Bukti Pajak ini apabila dikreditkan dalam pajak kita akan mengurangi jumlah PPh yang terutang atas NPWP PT Riset Perkebunan Nusantara.

Perlu diketahui bahwasannya jika transaksi penyerahan BKP/JKP dicatat dalam pencatatan perusahaan, namun faktur pajak yang dicetak rekanan tidak dikreditkan, maka beban pajak akan tetap dibebankan kepada PT Riset Perkebunan Nusantara. Hal ini dikarenakan tidak ada catatan pembayaran pajak berupa bukti potong yang dilaporkan perusahaan. Maka untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang, perusahaan perlu meminta bukti potong dari perusahaan rekanan dan melaporkannya ke KPP.

Upaya yang dilakukan diatas merupakan bentuk perencanaan perpajakan yang digunakan PT Riset Perkebunan Nusantara untuk meminimalisir beban pajak perusahaan. Upaya – upaya tersebut harus segera dilakukan perusahaan karena pajak merupakan bagian yang memiliki batas waktu yang ketat terkait pelaporan. Contohnya, pada poin empat disebutkan meminta bukti potong pada perusahaan rekanan, hal ini harus segera dilakukan karena bukti potong hanya dapat diklaim dalam periode tiga bulan sejak diterbitkan.

Seperti kebijakan maupun upaya lainnya, tentu ada kendala pada perencanaan pajak yang diterapkan selama ini. Dalam hal ini, khususnya pada poin empat masih sulit dilakukan karena pusat penelitian di bawah naungan PT Riset Perkebunan Nusantara masih belum mengklaim bukti potong yang ada di kantor pusat. Sedangkan kantor pusat tidak akan bisa melakukan kredit pajak apabila bukti potong tidak teridentifikasi berasal dari salah satu pusat penelitian di bawah naungannya. Apabila bukti potong dikreditkan dari kantor

pusat, maka pelaporan pajak dan laporan keuangan tidak akan menunjukkan keserasian dalam jumlahnya.

Oleh karena itu, Bagian Akuntansi dan Perpajakan PT Riset Perkebunan Nusantara masih perlu mengembangkan sistem kerja yang lebih efisien untuk mendukung perencanaan dalam bidang perpajakan ini. Apabila bukti potong dapat diidentifikasi dengan maksimal, maka hal ini akan berpengaruh terhadap laporan keuangan di tahun – tahun selanjutnya.

Beban pajak perlu mendapatkan perhatian mengingat hal ini merupakan salah satu faktor pengurang laba perusahaan dalam laporan keuangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan TRR (*Tax Rentation Ratio*) untuk mengukur efektivitas perencanaan pajak pada PT Riset Perkebunan Nusantara, dimana apabila TRR semakin tinggi, maka akan mencerminkan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan semakin efektif, dan sebaliknya jika TRR semakin rendah setiap tahunnya, maka perencanaan pajak yang diterapkan belum efektif. Berikut ini adalah tabel hasil perhitungan TRR pada PT Riset Perkebunan Nusantara Periode 2019-2021.

Table 10 Perhitungan TRR (*Tax Rentetion Ratio*)

<b>Keterangan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Laba sebelum Pajak	(25,101,921,721)	3,838,211,470	11,882,493,071
Laba bersih	(24,800,004,295)	1,755,476,563	1,698,823,939
TRR	0.987972338	0.457368380	0.142968645

Menurut Tabel 1 Perhitungan TRR (*Tax Rentention Ratio*) diatas, dapat dilihat bahwa hasil dari perhitungan yang dilakukan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, angka yang ditunjukkan semakin kecil setiap tahunnya. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan sebelumnya, hal ini berarti bahwa Kegiatan Perencanaan Pajak pada

PT Riset Perkebunan Nusantara masih bisa dimaksimalkan kembali dan membutuhkan perhatian yang lebih serius.

## 2. Perolehan Laba PT Riset Perkebunan Nusantara

Berdasarkan studi pustaka yang dilakukan penulis selama masa penelitian, laba PT Riset Perkebunan Nusantara diambil dari 3 (tiga) sumber pendapatan perusahaan, yaitu Pendapatan Riset, dan Pendapatan Penjualan. Pendapatan utama sendiri berasal dari Pendapatan Riset dan Pendapatan Pelayanan.

Pendapatan Riset berasal dari Pusat Penelitian yang berada dibawah naungan PT Riset Perkebunan Nusantara, diantaranya Pusat Penelitian Karet, Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Pusat Penelitian Teh dan Kina, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao, Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, dan Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia. Pendapatan Pelayanan Berasal dari Jasa Kajian dan Jasa Penelitian di Pusat Penelitian. Pendapatan Penjualan sendiri berasal dari penjualan produk olahan seperti Teh, Kopi, Coklat dengan beberapa varian seperti varian coklat jahe. Sedangkan pendapatan penjualan lain berasal dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit yang mengembangkan Kelapa Kopyor sebagai salah satu produk unggulan untuk penjualan produknya.

Laba PT Riset Perkebunan Nusantara pada periode 2019 -2021 dapat dikatakan cukup stabil setelah mengalami kerugian pada tahun 2019. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena kembali meningkat pada tahun 2020 dan stabil pada tahun 2021. Namun, kerugian pada tahun 2019 bukan merupakan dampak dari Pandemi COVID – 19. Hal ini dicerminkan melalui data Laba/Rugi PT Riset Perkebunan Nusantara yang disajikan pada tabel 2 dibawah ini.

Table 11 Data Laba Rugi PT Riset Perkebunan Nusantara tahun 2018 -2021

	Catatan	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018
<b>PENDAPATAN</b>					
<b>Pendapatan Utama</b>					
Pendapatan Riset	2a,26	31,288,764,861	31,221,064,861	52,792,603,493	29,127,312,306
Pendapatan Pelayanan	2a,27	35,412,129,355	35,124,916,205	41,440,813,497	53,428,196,321
Pendapatan Penjualan	2a,28	507,072,257,307	505,193,123,272	437,781,060,225	480,477,313,190
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>573,773,151,523</b>	<b>571,539,104,338</b>	<b>532,014,477,216</b>	<b>563,032,821,816</b>
<b>HARGA POKOK PENDAPATAN</b>					
<b>Harga Pokok Pendapatan Utama</b>					
HPP Riset	2a,29	(23,262,016,657)	(24,110,448,209)	(36,315,212,248)	(20,417,505,882)
HPP Pelayanan	2a,30	(27,310,244,066)	(28,601,591,842)	(33,663,141,621)	(33,040,160,311)
Harga Pokok Pendapatan Penjualan	2a,31	(252,056,738,884)	(242,252,223,950)	(314,976,419,123)	(350,617,941,292)
<b>JUMLAH HARGA POKOK PENDAPATAN</b>		<b>(302,628,999,607)</b>	<b>(294,964,264,001)</b>	<b>(384,954,772,992)</b>	<b>(404,075,607,485)</b>
<b>LABA KOTOR</b>		<b>271,144,151,916</b>	<b>276,574,840,337</b>	<b>147,059,704,224</b>	<b>158,957,214,331</b>
<b>BEBAN USAHA</b>					
Beban Penjualan	32	(10,966,929,893)	(12,928,780,780)	(12,799,182,633)	(10,199,217,905)
Beban Administrasi dan Umum	33	(255,331,810,631)	(264,191,072,607)	(133,267,220,789)	(162,320,072,646)
Pendapatan Usaha Lainnya	34	14,771,566,155	15,060,435,740	13,357,263,687	23,420,180,942
Beban Usaha Lainnya	34	(8,883,367,731)	(8,760,372,677)	(39,159,125,971)	(111,048,589,983)
<b>JUMLAH BEBAN USAHA</b>		<b>(260,410,542,102)</b>	<b>(270,819,790,324)</b>	<b>(171,868,265,706)</b>	<b>(260,147,699,592)</b>
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>		<b>10,733,609,814</b>	<b>5,755,050,013</b>	<b>(24,808,561,483)</b>	<b>(101,190,485,261)</b>
<b>PENDAPATAN &amp; BEBAN DILUAR USAHA</b>					
Pendapatan Diluar Usaha	35	3,185,876,634	2,989,925,450	4,031,248,885	5,180,091,167
Beban Diluar Usaha	35	(2,036,993,377)	(4,906,763,993)	(4,324,609,124)	(3,480,153,598)
<b>JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) DILUAR USAHA</b>		<b>1,148,883,257</b>	<b>(1,916,838,543)</b>	<b>(293,360,238)</b>	<b>1,699,937,570</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>11,882,493,071</b>	<b>3,838,211,470</b>	<b>(25,101,921,721)</b>	<b>(99,490,547,692)</b>

<b>Taksiran Pajak Penghasilan</b>	18				
<b>Pajak Kini</b>		(669,272,721)	(1,295,917,897)	(1,074,243,062)	(1,033,811,315)
<b>Pajak Tangguhan</b>		(9,514,396,412)	(786,817,010)	1,376,160,488	(540,287,205)
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>		<b>1,698,823,939</b>	<b>1,755,476,563</b>	<b>(24,800,004,295)</b>	<b>(101,064,646,212)</b>

Data diatas mengindikasikan bahwasannya kerugian sudah dialami sejak tahun 2018, sedangkan Pandemi COVID-19 dimulai pada tahun 2019. Jadi dapat disimpulkan bahwa kerugian perusahaan bukan merupakan salah satu akibat dari pademi yang terjadi.

3. Manajemen Laba Perusahaan pada PT Riset Perkebunan Nusantara  
Perhitungan laba setelah pajak pada PT Riset Perkebunan Nusantara dilakukan dengan mengurangi laba perusahaan yang diperoleh dalam satu periode dengan jumlah beban pajak badan. Pajak badan dihitung dari perlu diketahui dasar pengenaan pajaknya, bagi wajib pajak (WP) dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) luar negeri landasan pengenaan pajaknya merupakan penghasilan kena pajak (PKP) yang dihitung sebesar penghasilan netto nya (PKP WP Badan = Penghasilan Netto).

Menurut UU Perpajakan pasal 17 ayat 1b UU nomor 36 Tahun 2008 wajib pajak badan dalam negeri dan BUT tercatat sebesar 28%. Disebutkan juga dalam pasal 17 ayat 2a UU Nomor 36 tahun 2008 menyatakan bahwa tarif sebagaimana dinyatakan dalam ayat 1b menjadi 25% dan mulai berlaku sejak tahun 2010. Di dalam peraturan pemerintahan RI Nomor 30 Tahun 2020 (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2020) tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka pada pasal 2a bahwa tarif pajak penghasilan menjadi 22% yang berlaku dalam tahun pajak 2020 dan 2022.

Manajemen laba adalah campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan manajemen dan perusahaan. Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan. Manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang menggunakan angka hasil rekayasa tersebut. Manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan kebijakannya dalam pelaporan keuangan dan struktur transaksi untuk mengubah laporan keuangan. Hal ini dilakukan manajer dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang berbeda kepada stakeholder mengenai kinerja ekonomi perusahaan sehingga mempengaruhi hasil kontrak antara stakeholder dengan perusahaan.

Manajemen laba seringkali dikaitkan dengan praktik *window dressing*. *Window dressing* merupakan istilah dalam bidang keuangan dimana laporan keuangan perusahaan dibuat sedemikian rupa agar kinerja dan angka didalamnya dapat dikategorikan menjadi perusahaan sehat. Kategori ini didapatkan dari ketentuan dalam Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN Non Jasa Keuangan dengan total Bobot kategori BUMN non Infrastruktur dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Dalam kategori tersebut, terdapat indikator bobot rasio ROE, ROI, Rasio kas, Rasio lancar, *Collection Periods*, Perputaran persediaan, Perputaran total aset, dan Rasio modal sendiri terhadap Total Aset beserta bobot penilaian kesehatan perusahaan pada tabel 1 Daftar Indikator dan bobot aspek keuangan.

Praktik setiap perusahaan mengenai manajemen laba adalah atas dasar kebutuhan saja. Jadi, tidak akan ditemui praktik yang mengikat untuk perusahaan secara umum. Manajemen laba dipraktikkan dalam perusahaan ini, dengan tujuan laporan kinerja yang baik dan stabil pada akhir periode akuntansi.

Praktik ini dilakukan dengan cara melakukan pembebanan besar secara bertahap setiap bulan, seperti contohnya adalah pembebanan THR yang tentu akan dilakukan perusahaan setiap tahunnya. Daripada melakukan pembebanan pada satu bulan jatuhnya hari raya, PT Riset Perkebunan Nusantara melakukan praktik pembebanan ini secara bertahap dalam 10 bulan. Hal ini bertujuan agar laporan kinerja dapat lebih mencapai angka yang maksimal dibanding dengan melakukan pembebanan THR pada satu bulan saja.

## B. Pembahasan

Hasil dari penelitian ini merupakan hasil yang tergambar dari perhitungan TRR (*Tax Retention Ratio*) yang dilakukan pada Laba perusahaan PT Riset Perkebunan Nusantara dalam periode 2019 – 2021. Hasil TRR (*Tax Retention Ratio*) diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$TRR = \frac{Net\ Income}{Pretax\ Income\ (EBIT)}$$

*Keterangan:*

*TRR = Tax Retention Rate (tingkat retensi pajak)*

*Net Income = Laba bersih perusahaan*

*Pretax Income (EBIT) = Laba sebelum pajak .*

$$TRR_{2019} = \frac{24,800,004,295}{25,101,921,721} = 0.987972338$$

$$TRR_{2020} = \frac{1,755,476,563}{3,838,211,470} = 0.457368380$$

$$TRR_{2021} = \frac{1,698,823,939}{11,882,493,071} = 0.142968645$$

Berdasarkan perhitungan menggunakan persamaan tersebut, diperoleh angka – angka yang sebelumnya sudah dibahas pada Tabel 1 Perhitungan TRR (*Tax Rentetion Ratio*). Berdasarkan hasil tersebut, meskipun upaya – upaya perencanaan pajak pada PT Riset Perkebunan Nusantara sudah dilakukan, namun hasilnya masih belum mencapai titik optimal. Bahkan, hasil TRR (*Tax Rentetion Ratio*) sesuai dengan tabel, memiliki hasil rasio yang terus menurun setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil diskusi bersama dengan Kepala Urusan Pajak PT Riset Perkebunan Nusantara, terdapat hal – hal yang menyebabkan perencanaan pajak dari PT Riset Perkebunan Nusantara ini belum maksimal. Terutama pada bagian pengkreditan pajak dari bukti potong perusahaan rekanan. Hal ini dikarenakan bukti potong yang diperoleh kantor pusat, seringkali tidak diakui oleh pusat – pusat penelitian dibawah PT Riset Perkebunan Nusantara. Jadi, meskipun bukti potong tersebut ada, namun perusahaan tidak dapat mengkreditkan untuk keperluan pengurangan PPh terutang perusahaan. Hal itu tentu membuat perencanaan pajak berjalan tidak maksimal. Apabila bukti potong tersebut tetap dikreditkan, maka akan terjadi ketidaksesuaian antara Laporan keuangan di pusat penelitian dan kantor pusat. Tentunya hal ini tidak dapat terjadi karena akan terjadi ekualisasi antara laba fiskal dan akuntansi dari laporan keuangan akuntansi dan laporan keuangan fiskal yang akan menjadi dasar pengenaan pajak perusahaan. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi PT Riset Perkebunan Nusantara untuk memaksimalkan perencanaan pajak yang dilakukan.

Hasil dari penelitian “ANALISIS PENGARUH PERENCANAAN PAJAK TERHADAP LABA PERUSAHAAN PT Riset Perkebunan Nusantara Periode 2019 – 2021” ini menghasilkan pembahasan yang tidak sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan dan dibahas di Bab IV Hipotesis. Hal ini dikarenakan beberapa hal dibawah ini:

1. Perencanaan Pajak yang dilakukan di PT Riset Perkebunan Nusantara belum diterapkan secara maksimal, sehingga perubahan yang signifikan atas laba periode 2019 – 2021 bukan merupakan akibat dari perencanaan pajak yang diterapkan. Karena, meskipun laba meningkat dari periode 2019-2021 namun beban pajak kini perusahaan meningkat selama 3 (tiga) periode tersebut. Maka dari itu, Hipotesis I: Terdapat perubahan yang signifikan antara laba sebelum pajak dan setelah pajak ketika perencanaan pajak diterapkan dan sebelum perencanaan pajak diterapkan. Sehingga hipotesis I dianggap tidak memenuhi hasil penelitian.
2. Hipotesis II: Perencanaan Pajak berpengaruh positif terhadap laba, dimana semakin tinggi perencanaan pajak, maka semakin tinggi peluang perusahaan melaksanakan manajemen laba meskipun pada implementasinya, pengaruhnya kecil karena banyak faktor yang mempengaruhi manajemen laba. Hipotesis ini juga kurang sesuai dengan hasil penelitian dimana PT Riset Perkebunan Nusantara bukan merupakan perusahaan terbuka (tbk) yang laporan keuangannya digunakan untuk memperoleh investor untuk keperluan pengembangan perusahaan. Sedangkan praktik manajemen laba yang berkaitan erat dengan *window dressing* merupakan cara – cara yang dilakukan manajemen untuk menarik minat investor berdasarkan hasil perhitungan rasio bisnis yang menguntungkan.
3. PT Riset Perkebunan Nusantara hanya melakukan praktik manajemen laba untuk mengoptimalkan laporan kinerja yang harus diserahkan kepada *stakeholder*, yaitu PT Perkebunan Nusantara Holding III selaku pemegang saham sebesar 90, dan PT Perkebunan Nusantara V selaku pemegang saham sebesar 10%. Sehingga manajemen laba yang dilakukan tidak menimbulkan bias untuk pemakai laporan keuangan, dan tidak dipengaruhi oleh pajak perusahaan dan praktik perencanaan pajak perusahaan.

4. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah kurangnya upaya perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan. Hal ini perlu menjadi perhatian penuh mengingat bukti potong dapat mengurangi pajak terutang perusahaan terhadap negara. Hal ini juga dapat meningkatkan laba perusahaan karena laba berpengaruh terhadap beban yang menjadi faktor pengurang laba perusahaan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian “ANALISIS PENGARUH PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA PERUSAHAAN PADA PT Riset PERKEBUNAN NUSANTARA PERIODE 2019 – 2021” penulis mendapatkan beberapa poin kesimpulan, yaitu:

1. Bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh terhadap laba perusahaan. Hal ini dikarenakan perencanaan pajak yang efektif dilakukan dapat mengurangi beban pajak sehingga laba perusahaan meningkat.
2. Pada PT Riset Perkebunan Nusantara perencanaan pajak yang dilakukan belum efektif. Hal ini menyebabkan hasil perhitungan TRR (*Tax Retention Rate*) dari tahun 2019 – 2021 terus mengalami penurunan meskipun laba perusahaan meningkat setiap tahunnya.
3. Pada PT Riset Perkebunan Nusantara, perencanaan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba perusahaan. Hal ini dikarenakan manajemen laba yang dilakukan PT Riset Perkebunan Nusantara hanya meliputi kebijakan pembebanan Beban THR yang dilakukan selama 10 (sepuluh) bulan dengan tujuan pencapaian laporan kinerja yang lebih maksimal. Sedangkan perencanaan pajak dilakukan secara terpisah dengan tujuan yang berbeda, yakni mengurangi jumlah pajak yang terutang kepada negara.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, agar perencanaan pajak dapat diterapkan secara lebih efektif pada PT Riset Perkebunan Nusantara, upaya-upaya koordinasi antara pusat penelitian dan kantor pusat dapat lebih ditingkatkan kembali. Upaya perencanaan pajak ini juga akan lebih efektif dengan diberlakukannya hubungan antara pusat penelitian langsung dengan perusahaan rekanan sehingga klaim atas faktur pajak bisa dilakukan secara lebih maksimal. Hal ini akan sangat memudahkan dan meminimalisir adanya faktur pajak masukan dari rekanan yang tidak di klaim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Telaumbanua A., 2021, Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Laba Perusahaan pada PT Sari Enesis Indah Tahun 2017-2020, *Jurnal Audit dan Perpajakan* 1 (1) : 60-67.
- Achyani, Fatchan, Triyono, dan Wahyono. (2015). “Pengaruh Praktik Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening”. University Research Colloquium 2015
- Wardani, Dewi Kusuma dan Desifa Kurnia Santi. 2018. “Pengaruh Tax Planning, Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Manajemen Laba”. *Jurnal Akuntansi*, 6(1): 11-24
- Silalahi R.R.E, Ginting V, 2022, Pengaruh Perencanaan Pajak dan Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019, *JRAK* 8 (1) : 47-60.
- Pajakku.com, 2020. Pengetahuan Umum Perpajakan, diakses pada 03 Januari 2023, <https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan>
- Detik.com, 28 Juli 2022. Jenis Teknik Pengumpulan Data beserta Pengertian dan Contohnya, diakses pada 03 Januari 2023, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6202830/jenis-teknik-pengumpulan-data-beserta-pengertian-dan-contohnya>.
- Aditama Ferry, Purwaningsih Anna, 2014, Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Nonmanufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 26 (1) : 33-50.

Online-Pajak.com, 29 Oktober 2018. Ekualisasi Pajak: Pengertian, Tujuan, dan Dasar Hukumnya, diakses pada 01 Agustus 2023, <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/ekualisasi-pajak>

PT Riset Perkebunan Nusantara.2023.Laporan Manajemen Mei 2023. Bogor.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Perhitungan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain

**PERHITUNGAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020**  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018
<b>PENDAPATAN</b>				
<b>Pendapatan Utama</b>				
Pendapatan Riset	2a,26 31,288,764,861	31,221,064,861	52,792,603,493	29,127,312,306
Pendapatan Pelayanan	2a,27 35,412,129,355	35,124,916,205	41,440,813,497	53,428,196,321
Pendapatan Penjualan	2a,28 507,072,257,307	505,193,123,272	437,781,060,225	480,477,313,190
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>573,773,151,523</b>	<b>571,539,104,338</b>	<b>532,014,477,216</b>	<b>563,032,821,816</b>
<b>HARGA POKOK PENDAPATAN</b>				
<b>Harga Pokok Pendapatan Utama</b>				
HPP Riset	2a,29 (23,262,016,657)	(24,110,448,209)	(36,315,212,248)	(20,417,505,882)
HPP Pelayanan	2a,30 (27,310,244,066)	(28,601,591,842)	(33,663,141,621)	(33,040,160,311)
Harga Pokok Pendapatan Penjualan	2a,31 (252,056,738,884)	(242,252,223,950)	(314,976,419,123)	(350,617,941,292)
<b>JUMLAH HARGA POKOK PENDAPATAN</b>	<b>(302,628,999,607)</b>	<b>(294,964,264,001)</b>	<b>(384,954,772,992)</b>	<b>(404,075,607,485)</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>271,144,151,916</b>	<b>276,574,840,337</b>	<b>147,059,704,224</b>	<b>158,957,214,331</b>
<b>BEBAN USAHA</b>				
Beban Penjualan	32 (10,966,929,893)	(12,928,780,780)	(12,799,182,633)	(10,199,217,905)
Beban Administrasi dan Umum	33 (255,331,810,631)	(264,191,072,607)	(133,267,220,789)	(162,320,072,646)
Pendapatan Usaha Lainnya	34 14,771,566,155	15,060,435,740	13,357,263,687	23,420,180,942
Beban Usaha Lainnya	34 (8,883,367,731)	(8,760,372,677)	(39,159,125,971)	(111,048,589,983)
<b>JUMLAH BEBAN USAHA</b>	<b>(260,410,542,102)</b>	<b>(270,819,790,324)</b>	<b>(171,868,265,706)</b>	<b>(260,147,699,592)</b>
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>	<b>10,733,609,814</b>	<b>5,755,050,013</b>	<b>(24,808,561,483)</b>	<b>(101,190,485,261)</b>
<b>PENDAPATAN &amp; BEBAN DILUAR USAHA</b>				
Pendapatan Diluar Usaha	35 3,185,876,634	2,989,925,450	4,031,248,885	5,180,091,167
Beban Diluar Usaha	35 (2,036,993,377)	(4,906,763,993)	(4,324,609,124)	(3,480,153,598)
<b>JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) DILUAR USAHA</b>	<b>1,148,883,257</b>	<b>(1,916,838,543)</b>	<b>(293,360,238)</b>	<b>1,699,937,570</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>11,882,493,071</b>	<b>3,838,211,470</b>	<b>(25,101,921,721)</b>	<b>(99,490,547,692)</b>
<b>Taksiran Pajak Penghasilan</b>				
Pajak Kini	18 (669,272,721)	(1,295,917,897)	(1,074,243,062)	(1,033,811,315)
Pajak Tangguhan	(9,514,396,412)	(786,817,010)	1,376,160,488	(540,287,205)
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>	<b>1,698,823,939</b>	<b>1,755,476,563</b>	<b>(24,800,004,295)</b>	<b>(101,064,646,212)</b>
	(6,707,024)			
<b>Pendapatan komprehensif lain :</b>				
Laba (rugi) Pengukuran Kembali atas				
Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan	(49,873,230,576)	(16,683,035,031)	(13,489,151,289)	4,206,147,971
Pajak Terkait Penghasilan Komprehensif Lain	10,972,110,725	4,170,758,758	3,372,287,823	(1,051,536,993)
<b>Pendapatan komprehensif lain - neto</b>	<b>(38,901,119,851)</b>	<b>(12,512,276,274)</b>	<b>(10,116,863,467)</b>	<b>3,154,610,979</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>(37,202,295,913)</b>	<b>(10,756,799,711)</b>	<b>(34,916,867,762)</b>	<b>(97,910,035,233)</b>
<b>LABA (RUGI) PER SAHAM</b>	<b>17,581</b>	<b>18,167</b>	<b>(33,066,672)</b>	<b>(134,752,862)</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang  
 Tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bogor, 10 Maret 2021

Iman Yani Harahap  
 Direktur